

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hasil survei yang dibuat Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF tahun 2016 kemudian dianalisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database *International Center for Policy and Research* dan *International Center for Taxation and Development* ditemukan data bahwa terdapat penghindaran pajak perusahaan 30 negara. Negara Indonesia memasuki peringkat 11 terbesar dengan nilai yang diperkirakan sebesar 6,48 miliar dolar AS dimana perusahaan tidak membayar pajak perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia ([www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com)). Pada tahun 2017 Dirjen Pajak mencatat hingga 31 desember penerimaan pajak mencapai Rp 1.151 triliun atau 89,7% dari target sebesar Rp 1.283,6 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp 132,6 triliun ([www.economy.okezone.com](http://www.economy.okezone.com)).

Usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Bagi pemerintah, pajak yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber pendapatan utama untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak dianggap beban yang akan mengurangi pendapatan. Perusahaan menganggap pajak sebagai upaya biaya yang

akan mempengaruhi keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi dan menghemat biaya pajak semaksimal mungkin meskipun resiko yang ditanggung semakin besar. Perusahaan berusaha untuk menghindari beban pajak dengan melakukan praktik penghindaran pajak, yaitu berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal.

Salah satu fenomena penghindaran pajak dilakukan oleh IKEA. Perusahaan IKEA memindahkan labanya dari negara-negara dengan tarif pajak tinggi ke anak perusahaannya yang berlokasi di negara-negara dengan tarif pajak rendah. (forumpajak.org). Perusahaan sektor barang konsumsi pada sub sektor makanan dan minuman yaitu pada perusahaan PT. Coca Cola Indonesia (CCI). Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI sebesar Rp 603,8 miliar. Sedangkan berdasarkan perhitungan dari CCI, penghasilan kena pajak hanya berjumlah Rp 492,59 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun tersebut yang menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak (Kompas.com). Fenomena yang dijelaskan di atas menyebabkan target pemerintah tidak tercapai

karena wajib pajak tidak patuh dan membayar pajak tidak sesuai maka ada pihak yang dirugikan.

Strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara yang diperkenankan undang-undang namun strategi yang diterapkan perusahaan ini tetap merugikan penerimaan negara (Agusti 2014). Sebagaimana informasi yang disampaikan Bappenas (2005), terkait dengan penghindaran pajak ini di Indonesia pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan penanaman modal asing yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak. Fenomena penghindaran pajak lainnya dilakukan oleh PT Ades Alfindo Putrasetia Tbk (ADES) yang terindikasi melakukan manajemen laba. Badan Pengawas Pasar modal (Bapepam) memastikan manajemen PT ADES telah memberikan penyesatan informasi kepada publik berupa perbedaan penghitungan angka produksi dan penjualan dalam laporan keuangan perseroan. Laporan manajemen PT ADES mengenai adanya penggelembungan informasi yang dilakukan manajemen lama ternyata tidak disertai bukti-bukti yang cukup. Manajemen laba yang dilakukan PT ADES termasuk *increasing income* karena merekayasa penjualan bersih sehingga laba menjadi meningkat. PT ADES melakukan manajemen laba dengan tujuan untuk menarik investor agar menanamkan saham di PT ADES (finance.detik.com).

Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR merupakan kas yang dikeluarkan untuk biaya

pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Budiman 2012). Dyreng, Hanlon et al. (2010) menyatakan bahwa pengukuran *tax avoidance* yang baik adalah dengan menggunakan proksi CETR. Hal ini dikarenakan CETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat persentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan dan sebaliknya.

Perusahaan skala besar yaitu perusahaan yang memiliki sumber daya tinggi mampu merekrut orang yang ahli pajak dan mampu membayar konsultan pajak sehingga perusahaan akan lebih cenderung melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat dilihat dari kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba, semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajaknya. Menurut Ardyansah and Zulaikha (2014) menyatakan ukuran perusahaan juga bisa dilihat dengan besar kecilnya aset yang dimiliki suatu perusahaan, aset yang besar mengindikasikan perusahaan yang besar dan nilai atau skala yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan *log* total asset. Log total asset dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dan berkesinambungan antar periode (Yogiyanto, 2007:282). Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar

ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks (Hormati 2009).

Perusahaan besar biasanya akan menghasilkan laba yang tinggi sehingga akan mempengaruhi profitabilitas. Profitabilitas yang tinggi akan mendorong manajemen untuk menghasilkan laba optimal dengan meminimalkan beban pajaknya sehingga perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance* (Nugrahitha, 2018). Rasio profitabilitas menjadi bentuk penilaian terhadap kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan (Putri and Putra 2017). Salah satu rasio profitabilitas adalah *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan asset (Dewinta and Setiawan 2016). Semakin tinggi nilai ROA suatu perusahaan maka performa keuangan dan pengelolaan asset perusahaan tersebut dapat dikatakan baik. Semakin tinggi nilai profitabilitas maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* semakin tinggi.

Perusahaan yang mempunyai kekuasaan dengan kemampuan untuk meminimalkan pajak dengan cara-cara mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah. Perusahaan dengan koneksi politik akan lebih berani melakukan upaya penghindaran pajak karena risiko untuk diperiksa akan lebih rendah bahkan tidak akan mengalami

pemeriksaan oleh badan pemeriksa pajak (Mulyani 2014). Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance*.

Beberapa penelitian yang terkait dengan variabel ukuran perusahaan yaitu penelitian yang dilakukan Kurniasih, Maria et al. (2013), Putri and Putra (2017), Dewinta and Setiawan (2016), serta Darmawan and Sukartha (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Merslythalia and Lasmana (2016), Dewi and Jati (2014), dan Selvia (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Beberapa penelitian yang terkait dengan variabel profitabilitas yaitu penelitian yang dilakukan Kurniasih, Maria et al. (2013), Putri and Putra (2017), Utari and Supadmi (2017), Dewinta and Setiawan (2016), serta Darmawan and Sukartha (2014) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Cahyono, Andini et al. (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Beberapa penelitian yang terkait dengan variabel koneksi politik yaitu penelitian yang dilakukan Ferdiawan and Firmansyah (2017), Mulyani (2014), Hardianti and Puji (2014) serta Utari and Supadmi (2017) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Lestari and Putri (2017), Alfia (2016) serta Dharma and

Ardiana (2016) menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang mendapatkan hasil yang berbeda-beda, maka peneliti tertarik untuk menguji secara empiris “pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2017”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah; Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah; Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang akuntansi. Selain itu, penelitian ini diharapkan

dapat dijadikan literatur untuk memunculkan ide dan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak terkait dengan keputusan/kebijakan yang akan diambil. Penelitian ini juga dapat memberikan pandangan bagi perusahaan mengenai tindakan penghindaran pajak agar terhindar dari tindakan tersebut dan tidak terkena sanksi perpajakan. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan pandangan bagaimana manajemen perusahaan mengambil kebijakan terkait dengan perpajakan. Sedangkan bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan dalam pengambilan kebijakan perpajakan di masa mendatang

